

Pemanfaatan Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) dalam Perhitungan Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sikka

Maria Donaines Bevinuresi^{1*}, Antonius Philipus Kurniawan², Cicilia Ayu Wulandari Nuwa³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Email: donaines@gmail.com¹, antonius.philipus@gmail.com², ciciliawulandarinuwa@gmail.com³

Korespondensi penulis : donaines@gmail.com

Abstract : *This research focuses on the utilization of SIMGAJI in calculating family allowances where we can see whether the utilization is effective and efficient or not in using SIMGAJI so that it can be seen by calculating family allowances. To identify problems, this research uses qualitative research. Data collection techniques using interview techniques, observation, document studies. It can be concluded that the utilization of the Salary Information System (SIMGAJI) by PT. Taspen (Persero) for the calculation of family allowances for State Civil Apparatus (ASN) in Sikka Regency provides several significant advantages. SIMGAJI simplifies the management of salary and allowance data, ensures transparency, and improves the efficiency and accuracy of calculations. This makes the financial administration process simpler and more structured, and reduces the possibility of errors in the calculation of family allowances.*

Keywords: SIMGAJI, Family, Allowance

Abstrak : Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan SIMGAJI dalam perhitungan tunjangan keluarga dimana tunjangan tersebut kita dapat melihat pemanfaatan tersebut efektif dan efisien atau tidak dalam penggunaan SIMGAJI sehingga dapat dilihat dengan perhitungan tunjangan keluarga. Untuk mengidentifikasi permasalahan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumen. Dapat disimpulkan Pemanfaatan Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) oleh PT. Taspen (Persero) untuk perhitungan tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sikka memberikan beberapa keuntungan signifikan. SIMGAJI mempermudah pengelolaan data gaji dan tunjangan, memastikan transparansi, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi perhitungan. Hal ini membuat proses administrasi keuangan lebih sederhana dan terstruktur, serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan tunjangan keluarga.

Kata Kunci: SIMGAJI, Tunjangan, Keluarga

1. PENDAHULUAN

BPKAD Kabupaten Sikka sebagai salah satu perangkat daerah pada lingkup pemerintah Kabupaten Sikka yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pengelolaan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BPKAD juga membantu Bupati Sikka dengan mengelola keuangan dan aset daerah. Mereka memastikan anggaran direncanakan, dijalankan, dan dilaporkan dengan baik.

Di era globalisasi ini, banyak kegiatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi berbasis komputer. Penggunaan teknologi komputerisasi ini sangat memudahkan manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan termasuk dalam hal penggajian (I Made Panca Setiawan and Ni Ketut Dewi Irwanti 2021) Perusahaan membutuhkan suatu sistem pengolahan data informasi yang mendukung, dalam hal ini yang dimaksud adalah sistem informasi gaji.

Penerapan e-Government telah dimulai sejak tahun 2003 dimana pemerintah telah menginisiasi transformasi teknologi informasi ke sistem pemerintahan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government kemudian Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE.

Sistem informasi berbasis teknologi yang dikembangkan pemerintah berfungsi untuk membantu kelancaran tugas yang menjadi unsur pendukung dalam pelaksanaan fungsi dari manajemen. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut akan mampu meningkatkan efektifitas berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian dan kebenaran informasi (*validates*) yang dihasilkan dalam menunjang kinerja pemerintah. Hal ini berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer (*hardware*), program aplikasi pendukung (*software*), perangkat komunikasi dan internet sebagai sarana pengelolaan data dan informasi. Sehingga dengan pengolahan data yang baik yang diolah sedemikian rupa senantiasa dapat mengatasi yang terjadi dan dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat (Indarsari 2023). Dengan adanya informasi yang lengkap dan berkualitas serta pengelolaan yang profesional maka akan menambah keunggulan dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya sistem dan aplikasi penggajian yang baik memungkinkan instansi pemerintah memotivasi semangat kerja karyawannya yang produktif sehingga tujuan instansi pemerintah tercapai dengan produktifitas karyawan yang tinggi. penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) yang diimplementasikan di pemerintah daerah (Pemda). SIMGAJI adalah sistem aplikasi penggajian yang dibangun oleh PT. TASPEN (Persero) yang berfungsi untuk pengelolaan data gaji PNS Daerah pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Teknologi Informasi yang dapat diakses dan terintegrasi dengan unit kerja lainnya serta dapat menyajikan data secara akurat, tepat dan *up to date*.

Maka dari itu sistem informasi gaji ini sangat penting sehingga dapat membantu ASN dalam mengimput data mereka namun terlepas dari itu adapun *human error* dimana terjadi suatu keputusan atau perilaku manusia yang tidak tepat sehingga dapat mengurangi efektivitas dalam

pengimputan dimana data atau berkas yang akan diinput akan tercecer maka dari itu harus diminalisir dan mencegah terjadinya *human error* tersebut.

Tunjangan keluarga adalah salah satu bentuk tunjangan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja atau anggota keluarga dengan kriteria tertentu. Tujuan dari pemberian tunjangan keluarga adalah untuk membantu meringankan beban biaya hidup dan mendukung kebutuhan dasar keluarga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Tunjangan Keluarga merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada karyawan yang memiliki tanggungan keluarga.

Tunjangan keluarga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Indonesia. Pengaturan mengenai tunjangan keluarga tercantum dalam yang mengatur tentang jaminan sosial bagi pekerja. Namun, aturan tertulis mengenai tunjangan ini hanya berlaku bagi pegawai negeri. Kebijakan perusahaan untuk memberikan tunjangan ini juga berlaku bagi karyawan di sektor swasta.

Pengelolaan data yang efisien SIMGAJI memungkinkan pengelolaan data gaji dan tunjangan secara elektronik, yang mengurangi risiko kesalahan manual dan mempercepat proses penggajian transparansi dan akurasi data yang dihasilkan oleh SIMGAJI adalah transparan dan akurat, sehingga ASN dapat dengan mudah mengakses informasi tentang tunjangan mereka dimana dengan adanya SIMGAJI pengurangan beban kerja dengan otomatisasi proses penggajian, beban kerja administrasi keuangan dapat dikurangi, memungkinkan staf untuk fokus pada tugas-tugas lain yang lebih strategis.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas dalam perhitungan tunjangan ASN (Aparatur Sipil Negara) menggunakan SIMGAJI (Sistem Informasi Manajemen Gaji) sangat penting untuk memastikan bahwa proses penggajian berjalan dengan baik, tepat waktu, dan akurat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Dengan menggunakan metode kualitatif ini peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan terkait sistem informasi gaji (SIMGAJI) dalam perhitungan tunjangan keluarga. Analisis data

dalam penelitian ini menggunakan tiga analisis yaitu Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

BPKAD merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Aplikasi SIMGAJI adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Gaji, yang merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang khusus untuk mengelola proses penggajian pegawai ASN di suatu organisasi atau instansi. Biasanya, aplikasi SIMGAJI ini digunakan oleh unit atau bagian keuangan, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di kabupaten atau kota. Keberadaan aplikasi SIMGAJI membawa banyak manfaat bagi organisasi, antara lain meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi potensi kesalahan manusia, meningkatkan transparansi, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kepuasan pegawai dengan memberikan proses penggajian yang lebih cepat dan akurat. Aplikasi ini sebagai alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya (Kadir 2014)

SIMGAJI adalah sistem aplikasi penggajian yang dibangun oleh PT. TASPEN (Persero) yang berfungsi untuk pengelolaan data gaji PNS Daerah pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Teknologi Informasi yang dapat diakses dan terintegrasi dengan unit kerja lainnya serta dapat menyajikan data secara akurat, tepat dan *up to date*. Aplikasi SIMGAJI diberikan gratis kepada seluruh Pemda mulai dari sosialisasi, implementasi maupun pemeliharannya.

SIMGAJI mendukung proses pengelolaan gaji ASN meliputi pembuatan dan pencetakan gaji bulanan, rapel gaji/beras, perhitungan kekurangan gaji, pelaporan pajak penghasilan (PPH Pasal 21), pencetakan SKPP, dll. Tunjangan keluarga juga di hitung dalam SIMGAJI sehingga dapat dilihat dari Tunjangan keluarga ini diperuntukan bagi karyawan yang telah menikah dan memiliki tanggungan keluarga.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tunjangan anak dan isteri diberikan kepada karyawan yang sudah menikah, tunjangan suami/isteri diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bersuami/beristeri yaitu sebesar 10% dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila

kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu diantaranya yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata-nyata menajadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan yaitu sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak sebanyak-banyaknya 2 orang anak sudah termasuk anak angkat. Sementara anak di bawah 21 tahun, dengan batasan maksimal 3 orang anak. Adapun surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang penjelasan ketentuan perpanjangan batas usia anak pegawai negeri sipil yang berhak menerima tunjangan keluarga:

a. Pemberian Tunjangan Anak

- 1) Tunjangan anak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak, anak yang disahkan, anak angkat yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun
- 2) Ketentuan pemberian Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku juga bagi anak tiri yang sah.

b. Perpanjangan Batas Usia Penerima Tunjangan Anak batas usia anak yang menerima tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) di atas dapat diperpanjang sampai dengan usia anak 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah/kursus, dengan ketentuan sebagai yaitu surat Pernyataan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Kursus bahwa anak tersebut masih sekolah/kuliah/kursus.

Pada kesempatan yang ada penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang kemudian narasumber selaku staf sub keuangan bagian pengajian staf tersebut menanggapi atas pertanyaan yang diberikan merujuk pada pembahasan mengenai aplikasi SIMGAJI dalam menghitung tunjangan keluarga ASN. Selain itu, staf bagian gaji memberikan pandangannya mengenai efektivitas penggunaan aplikasi SIMGAJI. Menurut narasumber penggunaan aplikasi SIMGAJI dalam penggajian lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Sebelumnya BPKAD masih menggunakan mode manual dalam sistem penggajian pegawainya. Sebagaimana kelemahan sistem manual pada umumnya, apalagi dalam hal pegawai pensiun atau yang telah berhenti menerima gaji dimana perhitungan dan pengecekan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang masih manual mengakibatkan BPKAD mengalami kesulitan sehingga banyak pegawai yang masih menerima gaji, mengakibatkan pembayaran yang diterima tersebut harus dikembalikan ke kas negara karena pada dasarnya status

kepegawaian mereka telah berubah, maka dari itu dengan adanya sistem informasi gaji ini sangat membantu pekerjaan pegawai lebih mudah. Dalam mode manual juga sering ditemukan banyak perbedaan data penggajian antara SK pensiun dan maupun mutasi, diperlukan prosedur yang Panjang dalam mengimput data gaji sehingga kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maria Waldetrudis Marietis, S.E, selaku kepala bidang perbendaharaan daerah dan para staf bagian gaji di bidang perbendaharaan menyatakan bahwa pemanfaatan SIMGAJI dalam perhitungan tunjangan keluarga ASN di Kabupaten Sikka sangat membantu pekerjaan yang di perbendaharaan ada beberapa indikator yang membantu yaitu:

1. Efektivitas Perhitungan Tujangan dimana membantu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menghitung tunjangan keluarga sebelum dan setelah SIMGAJI. Sebelum adanya aplikasi dilakukan perhitungan secara manual dengan resiko kesalahan perhitungan yang tinggi dan membutuhkan dan membutuhkan waktu sehari-hari, sesudah adanya SIMGAJI perhitungan dilakukan secara otomatis pada saat administrator melakukan proses pembentukan gaji setiap bulan berdasarkan data keluarga yang telah dimasukan dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit jadi lebih cepat dalam mengimput data.
2. Akurasi perhitungan tunjangan yaitu dimana secara perhitungan oleh sistem tidak ada kesalahan. Terkadang ada kesalahan terjadi, karena faktor *human error*.
3. Peningkatan efisiensi proses administrasi yang dirasakan setelah implementasi SIMGAJI sangat besar, sehingga SOP pemutakhiran data pegawai bisa dibuat dengan mutu baku waktu yang sangat singkat dan sangat mengurangi beban administrasi.
4. Integrasi dengan sistem data kepegawaian dan absensi dimana SIMGAJI yang digunakan saat ini adalah versi desktop bukan website, sehingga belum terintegrasi dengan sistem lain. Namun SIMGAJI mampu menyiapkan format dan tipe data yang diperuntukan bagi sistem lain semisal SIPD dan tidak ada kendala tetapi lebih kepada perbedaan karakteristik antara sistem yang berbasis desktop dengan website.
5. SIMGAJI memastikan kepatuhan setiap ada perubahan regulasi terkait gaji, tunjangan, perhitungan pajak, jaminan Kesehatan dan kematian, selalu diikuti dengan pembaharuan pada SIMGAJI yang menyesuaikan dengan regulasi baru yang mulai diberlakukan.
6. SIMGAJI bisa meningkatkan transparansi dalam perhitungan dan distribusi tunjangan, data tunjangan bisa diakses dengan sangat mudah berdasarkan hak akses yang dimiliki oleh petugas. Transparansi SIMGAJI bukan berarti setiap orang bebas untuk melihat seluruh data di dalamnya karena sangat banyak data kepegawaian dalam SIMGAJI bersifat rahasia yang hanya bisa diakses oleh petugas yang berwenang.

7. Penggunaan SIMGAJI mengurangi ketergantungan pada penggunaan dokumen fisik namun dokumen fisik tetap dibutuhkan untuk proses administrasi, pertanggungjawaban dan pengarsipan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Dokumen fisik yang tidak digunakan setelah penggunaan SIMGAJI adalah kertas kerja perhitungan gaji dan tunjangan yang bersifat manual.
8. Tersedianya pelatihan penggunaan SIMGAJI dan dukungan teknis berupa *help desk* saat sistem mengalami gangguan bisa dilakukan dimana saja.

Penggunaan teknologi dalam aktivitas manusia dapat mempermudah banyak hal, Namun kesiapan manusia sebagai pengguna juga harus di perhatikan secara teknis dalam aplikasi SIMGAJI memang tidak ada kendala namun kesalahan-kesalahan yang beberapa kali terjadi karena input informasi yang kurang akurat karena data yang dimasukan oleh pegawai itu sendiri yang tidak benar. Meskipun begitu SIMGAJI masih memungkinkan untuk lebih ditingkatkan kecanggihannya dan fungsinya terkait sinkronisasi data dengan sistem lain. Dengan demikian, diharapkan kendala *human error* dapat diminimalisasi dengan data yang tersinkronisasi dan tetap mengikuti perkembangan zaman.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari laporan magang ini bahwa dengan adanya Pemanfaatan SIMGAJI dalam perhitungan tunjangan keluarga ASN di Kabupaten Sikka dapat memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi, akurasi, dan transparansi. Pemanfaatan Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) oleh PT Taspen (Persero) untuk perhitungan tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sikka memberikan beberapa keuntungan signifikan.

SIMGAJI mempermudah pengelolaan data gaji dan tunjangan, memastikan transparansi, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi perhitungan. Dengan sistem ini, data yang digunakan adalah *up-to-date* dan terintegrasi dengan berbagai sistem eksternal. Hal ini membuat proses administrasi keuangan lebih sederhana dan terstruktur, serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan tunjangan keluarga.

Namun pada tahap pengorganisasian masih terdapat kendala dalam pemberkasan atau masih juga ada admin yang tidak maksimal dalam melakukan tupoksinya. Pada tahap luaran (*output*) dari SIMGAJI yaitu rekap dan daftar gaji, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), hal ini telah mencapai tujuan utama dari penerapan SIMGAJI oleh Pemerintah Kabupaten Sikka yaitu dapat mempermudah tata kelola gaji bagi pegawai ASN

dan meminimalisir terjadinya kesalahan, dengan adanya SIMGAJI memudahkan BPKAD Kabupaten Sikka dalam mengelola penggajian di Kabupaten Sikka.

Saran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka untuk memberikan Sosialisasi agar Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Sikka patuh dan wajib untuk melaporkan Data Keluarga dan selalu memasukan berkas berkala untuk memastikan bahwa data yang ada di dalam SIMGAJI sesuai dengan data yang dilaporkan sehingga memudahkan sistem aplikasi dalam mengelola informasi yang terstruktur dan mengurangi terjadinya *human error* agar pengimputan tidak terjadi kesalahan dan berkas atau data tidak tercecer sehingga pengimputan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfreda, A. A., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis biaya operasional dan simpanan dalam memaksimalkan sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Tuke Jung Nele. *Akuntansi* 45, 5(1), 30-43.
- Aquinaldo, T. N., Gheta, A. P. K., & Juru, P. (2024). Analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran serta implikasinya terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3810-3814.
- Arisandi, D., & Moita, S. (2024). Effectiveness of application civil servant salary management information system in the financial and asset management agency of Konawe regency. 15(1), 23–31.
- Bunga, F. M., Obon, W., & Meylano, N. H. (2024). The effect of emotional branding and experiential marketing on Chosik (Chocolate Sikka) purchasing decisions in Sikka Regency. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)*, 5(8), 61-75.
- Bure, M. R., Wisang, I. V., & Juru, P. (2024). Kinerja pegawai ditinjau dari pengembangan karir dan motivasi kerja, studi kasus pada kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 6600-6606.
- Buu, A. L., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2024). Implementasi pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 156-167.
- Chuesta, R. N. B., Sanga, K. P., & Gheta, A. P. (2024). Peran agency theory terkait manajemen risiko kredit dalam upaya meminimalisir kredit bermasalah pada KSP Kopdit Obor Mas Kanca Pasar Alok. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1354-1359.

- Da Rato, E. Y., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Analisis perencanaan laba dengan penerapan titik impas pada Perumda Air Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Da Silva, Y. O., Temu, T. J., & Lamawitak, P. L. (2024). Knowledge management-based efforts to improve MSME performance (credit union intervention for MSME actors in Sikka Regency). *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 5(4), 429-434.
- Daud, A., Dj, A. A., Adianita, H., & Mado, Y. J. (2024). The influence of participative leadership style on job satisfaction with organizational citizenship behavior as a moderating variable. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2192-2200.
- Dekrita, Y. A., Afrianti, M., Della, M. F. C., Devance, M. R., Seka, G. F., Nunuhitu, P. C., ... & Bunga, M. A. V. (2024). Pentingnya pengetahuan dan kesadaran pajak bagi UMKM dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Bangkoor, Kecamatan TaliburA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 9942-9947.
- Dekrita, Y. A., & Goo, E. E. K. (2024). Manajemen keuangan perusahaan teori & praktik. *Eureka Media Aksara*.
- Elni, Y., Wellem, I., & Wulandari, C. A. (2024). Analisis proses pemberian pinjaman dalam mitigasi risiko kredit sebagai solusi kredit macet pada KSP Kopdit Pintu Air. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3579-3585.
- Febronia, V., & Goo, E. E. K. (2024). Prosedur pengajuan dan realisasi kredit pada KSP Kopdit Hiro Heling Cabang Utama. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 67-76.
- Florantino, A., Wellem, I., & Transilvanus, V. E. (2024). Efektifitas perencanaan penanganan dalam upaya percepatan pengentasan permukiman kumuh. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 563-568.
- Florida, M. I., Rengga, A., & Luju, E. (2024). Analisis anggaran kas dalam meningkatkan likuiditas pada KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4358-4368.
- Goo, E. E. K. (2024). Pengaruh total assets turn over terhadap return on assets pada KSP Kopdit Pintu Air. *Akuntansi* 45, 5(1), 86-91.
- Hardani, H. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *5 Revista Brasileira de Linguística Aplicada Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
- Hastuti, Y., Sanga, K. P., & Kurniawan, A. P. (2024). Implementasi sistem Daperma (PT. Pandai) pembayaran klaim asuransi dalam pelunasan hutang anggota meninggal dunia pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1280-1290.

- I Made Panca Setiawan, & Ni Ketut Dewi Irwanti. (2021). Sistem informasi manajemen penggajian PNS pada pemerintah Kabupaten Karangasem. *Journal of Applied Management Studies*, 2(2), 134-145. <https://doi.org/10.51713/jamms.v2i2.39>
- Indarsari, S. D. (2023). Penerapan sistem informasi manajemen gaji (Simgaji) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bontang. *Jurnal Paradigma (JP)*, 12(1). <https://doi.org/10.30872/jp.v12i1.11631>
- Irma, N., Ginting, B., Agusmidah, & Leviza, J. (2023). Penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 454-466. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.168>
- Indonesia, R. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kadir, A. (2014). Buku Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi (Edisi Revisi).
- Lorang, M. H. D., Obon, W., & Yulianti, M. (2024). Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3682-3686.
- Mado, Y. J., Irwansyah, R., Kasnowo, K., Irdhayanti, E., & Khairunnisa, K. (2024). The influence of organizational culture on service quality with compensation as a moderate variable. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 1638-1648.
- Maristela, T. N., Mitan, W., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis strategi keunggulan bersaing usaha penjahit rumahan dengan pendekatan analisis SWOT: Studi kasus pada usaha jahit Ibu Mersi di Desa Habi. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(2), 01-10.
- Noeng, A. Y., & Nuwa, C. A. W. (2024). Pengaruh quality of work life dan beban kerja terhadap kinerja karyawan KSP Kopdit Pintu Air Cabang Maumere. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Nuwa, C. A. W., Luju, E., Wisang, I. V., & Fatima, T. A. (2023). Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Ilin Medo Kecamatan Waiblama. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 705-713.
- Prilosadoso, B. H., Salampessy, M., Yahya, A. S., Afrizal, D., & Mado, Y. J. (2024). Socialization of improving the quality of public services through digital-based integrated village governance in villages. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(4), 1025-1030.
- Rino, R. Y., Dekrita, Y. A., & Da Silva, Y. (2024). Peningkatan kapasitas perencanaan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5637-5652.
- Romario, Y., Rangga, Y., & Erlin. (2022). Pengaruh kinerja pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka).

- Sangu, Y. F. E., Wellem, I., & Tonce, Y. (2024). Peran kelitbangan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa berbasis kajian di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4165-4169.
- Subu, F. K., Rengga, A., & Juru, P. (2024). Analisis rasio keuangan profitabilitas untuk menilai kinerja KSP Kopdit Pintu Air tahun 2017–2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4230-4238.
- Sugo, Y. N., Kurniawan, A. P., & Muda, V. A. (2024). Peran BAPELITBANG dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sikka. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 345-354.
- Titin, T., Dilliana, S. M., Tonce, Y., Tanur, E. A., & Winarti, T. (2024). Increasing village community knowledge through socialization of the waste independent village program. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(2), 262-268.
- Trivaika, E., & Andri Senubekti, M. A. (2022). Perancangan aplikasi pengelola keuangan pribadi berbasis Android. *Nuansa Informatika*, 16(1), 33-40. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>
- Valentino, G. R., Rengga, A., & Nuwa, C. A. W. (2024). Peran Bapelitbang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di tinjau dari retribusi parkir daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4159-4164.
- Wela, P. R., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Peran Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka melalui retribusi penjualan produk cokelat Sikka pada unit pelaksana teknis Sikka Innovation Centre. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3947-3951.
- Wisang, I. V., Transilvanus, V. E., & Mone, M. M. M. (2024). Pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Inspektorat Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 82-88.
- Yacob, W., Dekrita, Y. A., & Mone, M. M. M. (2024). Peran rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3952-3957.
- Zulhendra, Z., & Amalia, B. R. (2022). Sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada wilayah perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 2(1), 34-41. <https://doi.org/10.31933/jaaip.v2i1.547>